



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1711/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/III/2020

TENTANG

PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH) PADA
PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM, MALANG

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7331 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Nomenklatur Program Studi pada Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, tanggal 27 Desember 2019, Terdapat perubahan nama pada Program Studi Hukum Bisnis Syariah pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim menjadi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 huruf d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), tugas dan wewenang BAN-PT adalah menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi dan menyampaikannya kepada pihak terkait;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH) PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM, MALANG
- PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim,
- B dengan Nilai 355**
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal 17 Juli 2021.
- KETIGA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang berdasarkan pada Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 0965/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016
Tanggal : 17 Juli 2016.
tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2020
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN